

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Alamat : Jl Gatot Subroto Timur No 49 Denpasar Timur

Nomor Telepon : 0361 461171

Penjelasan Umum : Perkembangan industri di bidang perbankan akan berimbas pula pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan pula adanya peningkatan eksposur risiko bank. Penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan pada setiap bank. Tata kelola pada industri perbankan menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi akan semakin meningkat.. PT BPR Partakencana Tohpati memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT BPR Partakencana Tohpati dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan mempunyai daya saing di industri perbankan khususnya di kota Denpasar. Penerapan Tata Kelola yang baik pada PT BPR Partakencana Tohpati didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern dengan melibatkan seluruh organ bank, yaitu dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peran sentral guna Penerapan Tata Kelola di lingkungan PT BPR Partakencana Tohpati... PT BPR Partakencana Tohpati telah beroperasi lebih dari 29 (dua puluh Sembilan) tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola pada industri perbankan harus berdasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu :transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness). Hal ini didorong oleh komitmen bank untuk mencapai Visi yaitu terwujudnya bank yang tumbuh sehat, terpercaya, Tangguh dan maju Bersama nasabah... Penerapan Tata Kelola di PT BPR Partakencana Tohpati dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola....

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sih Wahyuti, S.Sos	Direktur Utama	Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank, yang diangkatannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut : a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan asas prudential banking practices serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangundangan yang berlaku, dan ketentuan internal Bank. c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris e. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. g.dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan operasional bank.
2	I Made Suastika, SE	Direktur	Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank, yang diangkatannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh atas tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut : a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan asas prudential banking practices serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangundangan yang berlaku, dan ketentuan internal Bank. c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris e. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan. g.dan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan operasional bank.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam tahun 2022 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi untuk melakukan Monitoring secara ketat terhadap debitur yang terdampak dari dampak COVID-19, Penerapan Tata Kelola secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. Atas rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan dengan cukup baik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nihil

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	Komisaris Utama	a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional bank, kecuali terkait dengan : (1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. dan. (2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2	I Komang Adi Dana Wijaya	Komisaris	a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. d. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank. e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional bank, kecuali terkait dengan : (1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank. dan. (2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi Kepada Direksi

a. Meningkatkan kompetensi karyawan, melalui pelatihan-pelatihan dan tetap melakukan pembinaan kepada bawahan agar target yang ditetapkan dapat tercapai. b. Melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kredit yang sudah direalisasikan agar penggunaannya tepat sasaran (sesuai dengan pengajuan permohonan kredit) c. Lebih berhati-hati dalam menangani permasalahan kredit dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait, agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

NIHIL

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT BPR Partakencana Tohpati .

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan perusahaan lain.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sih Wahyuti, S.Sos	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Made Suastika, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada, yaitu : Anggota Direksi Lain. 1. Sih Wahyuti, S.Sos - I Made Suastika, SE Tidak Ada. 2. I Made Suastika, SE - Sih Wahyuti, S.Sos Tidak Ada. Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris. 1. Sih Wahyuti, S.Sos - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM Tidak Ada, Sih Wahyuti, S.Sos - I Komang Adi Dana Wijaya Tidak Ada. 2. I Made Suastika, SE - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM Tidak Ada, I Made Suastika, SE - I Komang Adi Dana Wijaya Tidak Ada. Anggota Direksi dengan Anggota Pemegang Saham. 1. Sih Wahyuti, S.Sos - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM Tidak Ada, Sih Wahyuti, S.Sos - I Komang Adi Dana Wijaya Tidak Ada, Sih. Wahyuti, S.Sos - I Ketut Suwitra, SE Tidak Ada. 2. I Made Suastika, SE - Prof.Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM Tidak Ada, I Made Suastika, SE - I Komang Adi Dana Wijaya Tidak Ada, I Made. Suastika, SE - I Ketut Suwitra, SE Tidak Ada

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sih Wahyuti, S.Sos	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Made Suastika, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR baik itu hubungan dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris maupun pemegang saham tidak ada.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	4.000.000.000	50,00
2	I Komang Adi Dana Wijaya	2.400.000.000	30,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM, selaku Komisaris Utama memiliki saham pada BPR sebesar Rp4.000.000.000,- atau 50 persen dari modal yang ditempatkan sejumlah Rp8.000.000.000,-. I Komang Adi Dana Wijaya, selaku Komisaris memiliki saham pada BPR sebesar Rp2.400.000.000,- atau 30 persen dari modal yang ditempatkan sejumlah Rp8.000.000.000,-

Form A.04.20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	PT Tohpati Poultry	60,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM, selaku Komisaris Utama di PT BPR Partakencana Tohpati, juga memiliki saham mayoritas pada perusahaan lain yaitu pada PT Tohpati Poultry sebesar Rp400.000.000,- atau 60 persen dari total saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Komang Adi Dana Wijaya	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR antara satu dengan yang lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS, MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Komang Adi Dana Wijaya	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM selaku komisaris utama dan PSP mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang saham I Ketut Suwitra atas kepemilikan saham sebesar Rp1.600.000.000,- atau 20 persen dari seluruh saham sejumlah Rp8.000.000.000,-

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	210000000	2	162000000
2	Tunjangan	2	277240036	2	219893995
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	16950000	2	14000000
	Total		504190036		395893995

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa asuransi kesehatan (BPJS) sudah sesuai dengan hasil RUPS..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	tidak ada	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	tidak ada	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris berupa asuransi kesehatan (BPJS) sudah sesuai dengan hasil RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Sudah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, dll
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR menunjuk KAP yang sudah terdaftar di OJK
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaporkan hasil audit KAP dalam laporan tahunan BPR ke OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Ada deviasi waktu antara realisasi dengan target yang ditetapkan namun tidak signifikan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit sudah sesuai ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko pada BPR
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Telah disusun kebijakan dan pedoman secara tertulis dan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan melakukan evaluasi atas kebijakan Manajemen risiko dan transaksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Telah dilakukan sesuai dengan prosedur
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Penerapan sistem pengendalian intern secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penerapan manajemen risiko atas 3 (tiga) jenis risiko sesuai ketentuan yang diwajibkan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Telah dilakukan sesuai dengan prosedur
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Mengembangkan budaya manajemen risiko pada SDM telah dilakukan melalui pelatihan dan/atau sosialisasi terkait manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	2,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah dilakukan untuk menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Untuk menyusun laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada ketentuan yang mengaturnya.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	Sudah memiliki dan dilaksanakan dengan cukup baik
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Sudah dilakukan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Sudah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah dilaporkan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	5	Melanggar/melampaui BMPK karena modal BPR tergerus dengan adanya AYDA yang belum dapat diselesaikan melewati batas waktu ketentuan dari OJK dan juga dampak dari BPR dalam kondisi mengalami kerugian

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis telah menggambarkan rencana bisnis tahunan termasuk strategi rencana penyelesaian permasalahan BPR.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR telah didukung oleh pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	sudah dilakukan dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	sudah dilakukan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis termasuk apabila ada perubahan sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang mengaturnya
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	sudah dilakukan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR membuat laporan keuangan publikasi setiap triwulanan yang materinya sudah menyesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR membuat laporan tahunan yang materinya sudah menyesuaikan dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Sudah melaksanakan terkait dengan transparansi informasi produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilakukan penyusunan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilakukan sesuai yang diatur dalam ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Partakencana Tohpati

Posisi Laporan : 31 Desember 2022



LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. DR. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM
Jabatan : Komisaris Utama
2. Nama : Sih Wahyuti, S.Sos
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Timur No.49 (Komplek Ruko Maha Graha Blok 8-9), Denpasar - Bali

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Posisi 31 Desember 2022, PT BPR Partakencana Tohpati
2. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, PT BPR Partakencana Tohpati telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2019, tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan mengacu berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
3. Semua informasi dalam laporan Pelaksanaan Tata Kelola, PT BPR Partakencana Tohpati telah dimuat secara lengkap dan benar.

Demikian lembar persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 27 Januari 2023
PT BPR Partakencana Tohpati
Menyetujui

Prof. DR. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM
Komisaris Utama



Sih Wahyuti, S.Sos
Direktur Utama



BAB I

PENJELASAN UMUM

Perkembangan industri di bidang perbankan akan berimbas pula pada semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan pula adanya peningkatan eksposur risiko bank. Penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan pada setiap bank. Tata kelola pada industri perbankan menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi akan semakin meningkat.

PT BPR Partakencana Tohpati memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT BPR Partakencana Tohpati dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan mempunyai daya saing di industri perbankan khususnya di kota Denpasar. Penerapan Tata Kelola yang baik pada PT BPR Partakencana Tohpati didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern dengan melibatkan seluruh organ bank, yaitu dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peran sentral guna Penerapan Tata Kelola di lingkungan PT BPR Partakencana Tohpati.

PT BPR Partakencana Tohpati telah beroperasi lebih dari 29 (dua puluh Sembilan) tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola pada industri perbankan harus berdasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu :transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*). Hal ini didorong oleh komitmen bank untuk mencapai Visi yaitu terwujudnya bank yang tumbuh sehat, terpercaya, Tangguh dan maju Bersama nasabah.

Penerapan Tata Kelola di PT BPR Partakencana Tohpati dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi para Pemangku Kepentingan (*stakeholders*).

Guna terwujudnya PT BPR Partakencana Tohpati ("Bank") untuk menjadi bank yang sehat, maju, dan berkembang maka dengan ini bank berkomitmen senantiasa melaksanakan penerapan tata kelola yang baik dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan pada ke 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola tersebut di atas.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Direksi

Pada saat menyusun laporan ini Bank memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan jumlah anggota direksi sebanyak 2 (dua) orang, hal ini telah sesuai dengan ketentuan. Seluruh Anggota Direksi Bank bertempat tinggal di Denpasar, dimana lokasi kantor pusat Bank berada. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman di perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank, baik di bidang operasional, perkreditan dan bidang yang lainnya. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Direksi Bank tahun 2022

No.	Nama	Jabatan
1	Sih Wahyuti, S.Sos	Direktur Utama
2	I Made Suastika, SE	Direktur

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.

1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :



- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan *prudential banking practices* serta wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan internal Bank;
- c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
 - Fungsi audit intern;
 - Fungsi manajemen risiko; dan
 - Fungsi kepatuhan.
 - Fungsi APU dan PPT
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- e. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain sistem *recruitment*, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi;
- f. Memupuk reputasi sebagai Bank yang baik dan sehat diukur dari *service* dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip-prinsip *prudential banking practices*;
- g. Merumuskan *business strategy*, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko;
- h. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- i. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- j. Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- k. Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank sebanyak 2 (dua) orang telah sama dengan jumlah anggota Direksi.

Susunan Komisaris tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS,MM	Komisaris Utama
2	I Komang Adi Dana Wijaya, MM	Komisaris

Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang ditetapkan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, pada bank umum. Seluruh Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Denpasar, dimana lokasi kantor pusat Bank berada.

2.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bank dijabarkan sebagai berikut :

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha bank di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional bank, kecuali terkait dengan :
 - penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengaturmengenai batas maksimum pemberian kredit bank; dan
 - hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan bank.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris,
- Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.



- i. Dewan Komisaris wajib memberitahukan :
 - 1). pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2). keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- j. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris.
- k. Pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit mencantumkan:
 - 1). etika kerja;
 - 2). waktu kerja; dan
 - 3). peraturan rapat.
- l. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil.	



b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Nihil.			

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil.			



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sih Wahyuti, S.Sos	Rp0,00	0%
2.	I Made Suastika, SE	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT BPR Partakencana Tohpati tidak ada.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Sih Wahyuti, S.Sos			
2.	I Made Suastika, SE			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Sih Wahyuti, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Suastika, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada.				



2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Sih Wahyuti, S.Sos	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Made Suastika, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR.				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan(%)
1.	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS,MM	Rp4.000.000.000,00	50%
2.	I Komang Adi Dana Wijaya, MM	Rp2.400.000,00	30%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
<ul style="list-style-type: none">- Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM, selaku Komisaris Utama memiliki saham pada BPR sebesar Rp4.000.000.000,- atau 50% dari modal yang ditempatkan sejumlah Rp8.000.000.000,-.- I Komang Adi Dana Wijaya, selaku Komisaris memiliki saham pada BPR sebesar Rp2.400.000.000,- atau 30% dari modal yang ditempatkan sejumlah Rp8.000.000.000,-			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS,MM		PT Tohpati Poultry	60%
2.				
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM, selaku Komisaris Utama di PT BPR Partakencana Tohpati, juga memiliki saham mayoritas pada perusahaan lain yaitu pada PT Tohpati Poultry sebesar Rp400.000.000,- atau 60% dari total saham.				



E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS,MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Komang Adi Dana Wijaya, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS,MM	Tidak ada	Tidak ada	ada
2.	I Komang Adi Dana Wijaya, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Prof. Dr. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM selaku komisaris utama dan PSP mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang saham I Ketut Suwitra (adik kandung) atas kepemilikan saham sebesar Rp1.600.000.000,- atau 20% dari seluruh saham sejumlah Rp8.000.000.000,-				



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp210.000.000,00	2	Rp162.000.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp277.240.036,00	2	Rp219.893.995,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp16.950.000,00	2	Rp14.000.000,00
Total			Rp504.190.036,00		Rp395.893.995,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	ada	ada
4.	Fasilitas Lainnya	ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan hasil RUPS.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,55 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,19 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	3,35 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,35 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,08 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	24 Pebruari 2022	9	Rapat Triwulan IV/2021
2.	28 April 2022	12	Rapat Triwulan I/2022
3.	22 Agustus 2022	11	Rapat Triwulan II/2022
4.	03 September 2022	23	Strategi pertumbuhan kredit
5.	27 Oktober 2022	10	Rapat Triwulan III/ 2022
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 5 kali dalam setahun.			



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Prof. Dr.Ir. Nyoman Suparta, MS,MM	5	0	100%
2.	I Komang Adi Dana Wijaya, MM	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2022 (tahun laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan baik oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi, Anggota Pegawai Tetap dan Anggota Pegawai Tidak Tetap pada PT BPR Partakencana Tohpati.								



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
A. Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)		
1) I Gusti Ayu Suci		
- Bahwa, BPR telah melaksanakan permohonan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri Denpasar dan atas permohonan BPR, oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah dilaksanakan penjualan lelang melalui KPKNL Denpasar, penetapan lelang mana dilaksanakan pada Hari Rabu, 02 Nopember 2022.		
- Bahwa BPR telah melaksanakan pembelian lelang atas agunan debitur melalui akta de command.		
- Bahwa atas pembelian lelang BPR, oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah dilaksanakan pengembalian uang hasil lelang kepada BPR yang telah dituangkan dalam berita acara pada tanggal 28 Nopember 2022.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil.							



L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	23 Februari 2022	Sosial	Sumbangan ogoh-ogoh	Br. Kerta Graha	Rp200.000,00
2.	02 Desember 2022	Sosial	Sumbangan korban gempa Cianjur	Masuk Rekening Mandiri (1670003334447/ Perbarindo)	Rp500.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil.					



BAB III

HASIL *SELF ASSESSMENT* DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil *Self Assessment*

Nama BPR : PT BPR Partakencana Tohpati
Alamat : Jl. Gatot Subroto Timur No. 49 Denpasar
Nomor Telepon : 0361 461171
Posisi Laporan : Desember 2022
Modal Inti : Rp3.831.016.218,00
Total Aset : Rp62.722.896.481,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Partakencana Tohpati Desember 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1,92 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,15	0,230
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,56	0,234
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,00	0,000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2,60	0,260
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2,00	0,200
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,25	0,225
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,05	0,051
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2,23	0,223
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2,60	0,195
10	Rencana Bisnis BPR	2,00	0,150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, serta Pelaporan Internal	2,00	0,150
Nilai Komposit			1,92
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1,15)

Jumlah anggota Direksi PT BPR Partakencana Tohpati adalah 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur, yang juga merupakan anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1,56)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT BPR Partakencana Tohpati adalah 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0,00)

Tidak Menerapkan Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2,60)

PT BPR Partakencana Tohpati dalam penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2,00)

PT BPR Partakencana Tohpati telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2,25)

Pejabat Eksekutif Audit Intern di PT BPR Partakencana Tohpati telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2,05)

PT BPR Partakencana Tohpati telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil dari Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh pihak BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2,23)

PT BPR Partakencana Tohpati telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko yang dimaksud telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.



9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2,60)

PT BPR Partakencana Tohpati telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam menjalankan Operasional BPR dan selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2,00)

Rencana Bisnis Bank PT BPR Partakencana Tohpati telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, serta Pelaporan Internal (Nilai S + P + H : 2,00)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT BPR Partakencana Tohpati telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. PT BPR Partakencana Tohpati juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

- Faktor positif **Aspek Struktur Tata Kelola** adalah BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam struktur organisasi sudah berjalan dengan baik. Dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT BPR Partakencana Tohpati yaitu masih dibutuhkannya rekrutmen terhadap Sumber Daya Manusia yang berkualitas guna dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan BPR kedepannya menjadi semakin membaik.
- faktor positif **aspek Proses Tata Kelola** yaitu dimana telah adanya pemisahan tugas dan fungsi yang jelas dari semua bagian dan juga telah dituangkan secara tertulis serta dilaksanakan dengan cukup baik. BPR senantiasa selalu mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan sadar akan timbulnya risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola bagi BPR yakni perlunya secara berkelanjutan untuk melakukan kaji ulang atas Kebijakan ataupun SOP yang dimiliki agar tetap selaras dengan ketentuan terbaru dari pihak regulator, guna dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi saat ini dan kedepannya.



- Selanjutnya, dari sisi faktor positif **aspek Hasil Tata Kelola** bahwa BPR masih dapat beroperasi dengan cukup baik terbukti dari likuiditas bank masih terjaga dengan rasio tergolong kategori sehat.

Dari sisi permodalan hingga posisi 31 Desember 2022 belum sesuai dengan ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR, hal ini disebabkan karena BPR mengalami kerugian ditambah juga adanya Agunan Yang Diambil Alih yang telah jatuh tempo belum dapat diselesaikan sehingga diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan KPMM BPR. Kekurangan Penyediaan Modal Minum BPR saat ini dari para pemegang saham telah berkomitmen untuk melakukan setoran modal sebesar Rp2 miliar secara bertahap dari bulan Desember 2022 hingga bulan Mei 2023.

Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu berdasarkan pada hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal BPR selama tahun 2022 masih terdapat adanya beberapa kelemahan yang terjadi dan atas hal tersebut telah dilakukan tindak lanjut perbaikannya.

Denpasar, 27 Januari 2023
PT BPR Partakencana Tohpati
Menyetujui


Prof. DR. Ir. Nyoman Suparta, MS, MM
Komisaris Utama



Sih Wahyuti, S.Sos
Direktur Utama

KANTOR PUSAT Jl Gatot Subroto No 49 Denpasar Komplek Ruko Maha graha Blok 8-10 Tlpn/Fax : (0361) 461171
KANTOR CABANG Jl Raya Buruan Blahbatuh Gianyar Tlpn/Fax: (0361) 943831

 partakencana@yahoo.co.id  [Bpr partakencana](https://www.facebook.com/Bprpartakencana)  [Bprpartakencana](https://www.instagram.com/Bprpartakencana)  www.bprpartakencana.com



BPR PARTAKENCANA

PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI

MUDAH, CEPAT, BERSAHABAT

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Partakencana Tohpati

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505982-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601848-30012023083711

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

partakencana@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 08:37:11



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



BPR PARTAKENCANA
PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI
MUDAH, CEPAT, BERSAHABAT

Nomor : 13/OPS/PKT/III/2023
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR PARTAKENCANA

Denpasar, 26 Maret 2023

Kepada Yang Terhormat
Dewan Pengurus Pusat
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia
KOMP. PATRA II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.5/SEOJK.03/2016, tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) bagi BPR, dimana salah satu kewajiban BPR menyampaikan Laporan kepada Asosiasi (Perbarindo) dan Satu Kantor Media atau Majalah Ekonomi. Maka dengan ini kami sampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan GCG PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI posisi 31 Desember 2022.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian serta bimbingannya kami sampaikan terima kasih.

PT BPR PARTAKENCANA TOHPATI

Mengetahui,


Prof. Dr. Ir. Niswan Supriatna, MS, MM
Komisaris Utama



Suh Widiyati, S.Sos
Direktur Utama